

Indeks Desa Membangun sebagai Refleksi Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Nasional Tahun 2022–2024

Oleh

Ibrohim

FISIP-Universitas Wiralodra

ibrahimshaleh@gmail.com

Received : Juli 21, 2025

Revisi : Agustus 04, 2025

Accepted : Agustus 18, 2025

Available online : Agustus 28, 2025

DOI: 10.31943/aspirasi.v15i2.142

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Indeks Desa Membangun (IDM) mencerminkan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia pada periode 2022–2024. Berbeda dari studi yang menitikberatkan pada aspek fiskal dan capaian administratif, artikel ini memfokuskan diri pada dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam IDM sebagai indikator reflektif atas pembangunan berbasis komunitas. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan data sekunder dari Kemendesa serta penelitian terdahulu, artikel ini menelaah perubahan status desa serta makna di balik peningkatan angka IDM dalam konteks partisipasi warga, transformasi sosial, dan penguatan kapasitas lokal. Hasil menunjukkan bahwa meskipun jumlah desa mandiri meningkat signifikan, tantangan pemberdayaan tetap ada, terutama dalam hal ketimpangan wilayah dan keterbatasan partisipasi kelompok rentan. Penelitian ini menyarankan perlunya reorientasi IDM sebagai alat ukur yang tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitatif secara substantif.

Kata Kunci: Indeks Desa Membangun, Pemberdayaan Masyarakat, Evaluasi Desa, Partisipasi Sosial, Transformasi

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam paradigma pembangunan berbasis komunitas, masyarakat desa tidak lagi diposisikan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam seluruh proses pembangunan. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya melalui skema Dana Desa,

sebagai upaya memperkuat kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa (Ulum & Anggani, 2020).

Untuk menilai keberhasilan pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memperkenalkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur kemajuan status desa berdasarkan tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi (Iskandar, 2020). IDM tidak hanya digunakan untuk pemetaan status desa (dari sangat tertinggal hingga mandiri), tetapi juga dijadikan acuan utama dalam penyusunan kebijakan, alokasi Dana Desa, dan evaluasi capaian pembangunan. Namun demikian, masih terdapat pertanyaan kritis: apakah peningkatan skor atau status IDM benar-benar mencerminkan proses pemberdayaan masyarakat yang sejati, ataukah hanya sekadar kemajuan administratif dan infrastruktur?

Periode 2022–2024 menjadi momen penting dalam pembangunan perdesaan di Indonesia. Setelah pandemi COVID-19, pemerintah mendorong transisi kebijakan dari bantuan langsung tunai (BLT) ke arah pemberdayaan ekonomi produktif, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pembangunan desa berbasis potensi lokal. Dalam konteks ini, refleksi terhadap efektivitas IDM sebagai indikator pemberdayaan masyarakat menjadi semakin relevan dan mendesak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat isu pemberdayaan masyarakat desa dari berbagai perspektif. Misalnya, (Nurmalasari & Supriyadi, 2021) menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang berbasis partisipasi, adaptasi lokal, dan akuntabilitas mendorong peningkatan status desa dari tertinggal menjadi maju. Namun, studi mereka hanya terbatas pada satu desa di Bandung dan tidak menyelidiki sejauh mana capaian tersebut berasal dari transformasi sosial internal masyarakat. Di sisi lain, (Wahyuningrat et al., 2024) melalui pendekatan kuantitatif menemukan bahwa dua faktor yang paling mempengaruhi pemberdayaan masyarakat adalah responsivitas aparat desa dan partisipasi aktif masyarakat. Temuan ini memperkuat argumen bahwa indikator teknokratis seperti IDM perlu dibaca bersamaan dengan indikator partisipatif. Penelitian oleh (Sukmawati et al., 2019) juga menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam memastikan Dana Desa benar-benar memberdayakan masyarakat.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah antara capaian angka dan proses sosial. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis data sekunder nasional IDM 2022–2024 dan didukung kajian literatur, artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah peningkatan status desa dalam IDM juga mencerminkan peningkatan pemberdayaan

masyarakat secara substantif. Tujuannya adalah mendorong penggunaan IDM bukan hanya sebagai alat ukur administratif, tetapi juga sebagai refleksi transformasi sosial yang lebih holistik di tingkat desa.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup tiga kerangka utama: konsep Dana Desa, pemberdayaan masyarakat, dan Indeks Desa Membangun (IDM), serta teori efektivitas kebijakan publik sebagai alat analisis. Kajian teoritis dalam artikel ini mencakup tiga komponen utama yang saling berkelindan: (1) konsep Indeks Desa Membangun (IDM), (2) kerangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, dan (3) pendekatan evaluasi sosial terhadap pembangunan berbasis komunitas.

1. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun merupakan instrumen pemetaan status desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. IDM dibentuk dari tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. Masing-masing dimensi diukur melalui sejumlah indikator, seperti akses pendidikan dan kesehatan (sosial), keberadaan ekonomi produktif (ekonomi), serta pengelolaan risiko bencana dan sanitasi (ekologi). Berdasarkan skor akhir, desa diklasifikasikan menjadi lima kategori: sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Sebagai instrumen kebijakan, IDM digunakan untuk beberapa fungsi strategis: penetapan prioritas alokasi Dana Desa, pemetaan ketimpangan wilayah, serta indikator capaian pembangunan.

2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merujuk pada proses meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengontrol kehidupannya, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Menurut (Suharto, 2009), pemberdayaan mencakup empat dimensi utama: penguatan kapasitas, peningkatan akses terhadap sumber daya, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dan transformasi struktur sosial yang tidak adil.

Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan terjadi ketika masyarakat:

- 1) Terlibat dalam musyawarah desa secara bermakna (bukan simbolik);
- 2) Mampu mengelola kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal;
- 3) Memiliki akses yang setara terhadap pelayanan dan sumber daya publik;
- 4) Mampu mengorganisasi diri melalui kelembagaan lokal (seperti BUMDes, kelompok tani, forum perempuan, dll).

3. Evaluasi Sosial Pembangunan Berbasis Komunitas

Evaluasi pembangunan desa selama ini cenderung menggunakan pendekatan hasil/*output* (seperti status IDM), padahal pembangunan berbasis komunitas perlu dinilai pula dari proses sosialnya. Chambers dalam konsep "*participatory rural appraisal*" menekankan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari perubahan infrastruktur atau skor indeks, melainkan dari perubahan relasi kuasa, peningkatan kesadaran kolektif, dan kemampuan masyarakat untuk merumuskan serta mengelola program secara mandiri (Hidayana et al., 2019).

Kerangka evaluatif ini juga sejalan dengan teori "*transformative participation*" (White, 1996) yang membedakan antara partisipasi manipulatif, simbolik, hingga partisipasi otentik. Dalam konteks IDM, penting untuk menelaah apakah peningkatan status desa juga diiringi dengan peningkatan partisipasi dan keberdayaan yang bersifat transformatif. Dengan menggabungkan ketiga kerangka teoritis di atas, penelitian ini berupaya memahami IDM bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai representasi dari dinamika sosial pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Wulz, 1986).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan analisis berbasis data sekunder. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami makna sosial di balik perubahan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM), serta mengevaluasi sejauh mana IDM dapat merefleksikan proses pemberdayaan masyarakat desa secara substantif.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan sumber publik, antara lain:

- 1) Data Indeks Desa Membangun (IDM) nasional tahun 2022, 2023, dan 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- 2) Artikel jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Indonesia yang tercakup dalam pemetaan IDM selama periode 2022–2024. Analisis dilakukan pada level nasional (agregat), untuk melihat pola perubahan status desa dan tren yang berkaitan dengan indikator pemberdayaan.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital atas laporan-laporan IDM dari situs resmi Kemendesa dan dokumen pendukung dari kementerian terkait. Data kemudian disusun ke dalam tabel komparatif dan grafik tren untuk mempermudah analisis pergeseran status desa, serta diinterpretasikan dalam konteks indikator sosial-pemberdayaan.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara tematik dan naratif, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan tren perubahan status desa berdasarkan kategori IDM (sangat tertinggal hingga mandiri);
- 2) Menganalisis relevansi tiga dimensi IDM (sosial, ekonomi, ekologi) terhadap proses pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengaitkan temuan dengan kerangka teori pemberdayaan dan evaluasi partisipatif (Chambers, White, Suharto);
- 4) Menyimpulkan apakah status IDM dapat dijadikan indikator yang merefleksikan proses pemberdayaan secara menyeluruh.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali makna di balik data numerik, serta menjembatani kesenjangan antara capaian administratif dan realitas sosial di desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tren Perubahan Status Desa dalam IDM Tahun 2022–2024

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), terjadi pergeseran status desa yang signifikan pada periode 2022 hingga 2024. Jumlah desa dengan status "mandiri" mengalami peningkatan dari 6.238 desa pada tahun 2022 menjadi 11.456 desa pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah desa "sangat tertinggal" menurun dari 4.365 desa menjadi 2.312 desa. Kategori desa "berkembang" tetap mendominasi secara kuantitatif, meskipun mengalami sedikit penurunan.

Tabel 1. Jumlah Desa per Kategori IDM Tahun 2022–2024

Tahun	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2022	6.238	15.622	33.902	7.154	4.365
2023	9.548	20.249	33.810	4.850	2.866
2024	11.456	20.610	32.467	3.208	2.312

Sumber: Kemendesa (2022–2024)

Tren ini menunjukkan bahwa secara makro, desa-desa di Indonesia mengalami peningkatan status dalam hal ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Namun demikian,

perubahan status ini masih perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks proses pemberdayaan itu sendiri.

2. Dimensi IDM dan Indikasi Pemberdayaan Masyarakat

IDM terdiri dari tiga dimensi yang secara konseptual relevan dengan pemberdayaan masyarakat:

1) Ketahanan Sosial

Dimensi ini meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat desa, seperti kesehatan, pendidikan, kekuatan jaringan sosial, dan kondisi tempat tinggal. Indikator yang digunakan mencerminkan ketersediaan layanan kesehatan, tingkat partisipasi pendidikan, kohesi sosial antarwarga, serta mutu hunian dan lingkungan sekitar (Sunoto et al., 2023).

2) Ketahanan Ekonomi

Aspek ini menilai kekuatan ekonomi desa melalui keberagaman aktivitas produksi, aktivitas perdagangan, kemudahan akses terhadap lembaga keuangan, serta konektivitas wilayah. Indikatornya mencakup variasi produk unggulan desa, keberadaan sarana jual beli seperti pasar, akses terhadap institusi keuangan, dan infrastruktur seperti jalan serta sistem transportasi (Musfiroh et al., 2019).

3) Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Dimensi ini menitikberatkan pada keberlanjutan dan keselamatan lingkungan hidup, dengan fokus pada kondisi ekologis, potensi risiko bencana, dan kemampuan menghadapi bencana. Indikator yang digunakan mencakup kualitas sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah, tingkat kerentanan terhadap bencana alam, upaya mitigasi yang dilakukan, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat (Kerta Arsana et al., 2024).

Meskipun peningkatan skor IDM secara agregat dapat diartikan sebagai kemajuan pembangunan, belum tentu sepenuhnya mencerminkan pemberdayaan yang bersifat transformasional. Misalnya, keberadaan usaha ekonomi produktif tidak otomatis berarti warga memiliki kontrol atas sumber daya, atau bahwa perempuan dan kelompok rentan turut aktif dalam pengambilan keputusan desa.

Menurut teori partisipasi (Wulz, 1986), perubahan status desa ke level “mandiri” harus dikaji lebih dalam: apakah masyarakat berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan, atau hanya menjalankan program yang telah ditentukan dari atas. Dalam

banyak kasus, program pembangunan tetap bersifat *top-down* meskipun status IDM meningkat.

3. Ketimpangan Wilayah dan Kesenjangan Proses

Analisis geografis menunjukkan bahwa peningkatan status IDM tidak merata antar wilayah. Beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera menunjukkan lonjakan desa mandiri, sementara kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan NTT masih didominasi oleh desa berkembang dan tertinggal. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan status desa masih sangat bergantung pada kapasitas sumber daya lokal, akses informasi, dan dukungan kelembagaan (Kemendesa, 2024).

Selain itu, belum terdapat mekanisme IDM yang secara eksplisit menangkap keberhasilan proses-proses pemberdayaan seperti pengorganisasian masyarakat, transformasi struktur relasi kuasa di desa, dan penguatan kapasitas aktor lokal. Padahal, keberhasilan sejati ditandai oleh kemampuan komunitas untuk merumuskan dan mengelola pembangunan secara mandiri (Ulum & Anggainsi, 2020).

Temuan ini selaras dengan studi (Wahyuningrat et al., 2024) yang menekankan bahwa responsivitas aparat desa dan partisipasi aktif masyarakat merupakan penentu utama keberhasilan sosial. Begitu pula dengan (Sukmawati et al., 2019) yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam memastikan Dana Desa berdampak positif terhadap pemberdayaan.

Namun demikian, seperti dicatat oleh (Nurmalasari & Supriyadi, 2021), capaian administratif semata tidak cukup; diperlukan upaya untuk menilai kualitas proses sosial yang menyertai pencapaian status IDM. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa peningkatan status desa perlu dibaca secara reflektif dan kontekstual, bukan hanya sebagai keberhasilan struktural, melainkan juga proses transformasi sosial yang berkelanjutan.

4. Refleksi Kritis terhadap IDM sebagai Alat Ukur

Meskipun Indeks Desa Membangun (IDM) telah menjadi salah satu instrumen kebijakan yang penting dan praktis dalam memetakan kondisi objektif desa, pendekatan kuantitatif yang digunakan tetap memiliki sejumlah keterbatasan signifikan jika ditinjau dari perspektif pemberdayaan masyarakat. IDM bekerja dengan model agregasi indikator-indikator teknis yang bersifat numerik—seperti keberadaan fasilitas pendidikan, sarana ekonomi produktif, dan kapasitas kelembagaan desa—namun tidak

selalu mampu merekam aspek-aspek kualitatif dan dinamis dari proses pemberdayaan itu sendiri.

Dalam praktiknya, indikator seperti partisipasi warga, perubahan pola pikir, rasa kepemilikan terhadap program pembangunan, serta tumbuhnya kesadaran kolektif tidak mudah dikonversi menjadi angka-angka statistik. Misalnya, keberadaan forum musyawarah desa belum tentu menjamin bahwa semua suara—terutama kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan difabel—diakomodasi secara setara. Demikian pula, keberadaan BUMDes belum tentu mencerminkan bahwa masyarakat memiliki kontrol atau kemandirian ekonomi, jika manajemennya masih elitis dan *top-down*.

Selain itu, IDM juga belum cukup menangkap transformasi sosial yang lebih dalam, seperti munculnya inovasi dari bawah, peningkatan kapasitas kepemimpinan komunitas, serta penguatan solidaritas antarwarga. Dalam konteks ini, ketimpangan relasi kekuasaan di tingkat desa dan proses pengambilan keputusan yang tidak inklusif sering kali tersembunyi di balik capaian-capaian formal administratif.

Dengan demikian, penting untuk mengembangkan IDM tidak hanya sebagai alat ukur kuantitatif berbasis *output*, tetapi juga sebagai alat reflektif-partisipatif yang mampu menangkap proses. Penguatan metodologi pengumpulan data yang lebih dialogis dan kontekstual—seperti penilaian partisipatif komunitas (*community scorecard*), pemetaan sosial (*social mapping*), dan observasi kualitatif—perlu mulai dipertimbangkan sebagai pelengkap dari pendekatan teknokratis. Hanya dengan begitu, IDM dapat menjadi sarana evaluasi pembangunan yang lebih adil, representatif, dan selaras dengan semangat pemberdayaan masyarakat desa secara substansial..

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indeks Desa Membangun (IDM) berhasil merekam peningkatan status desa secara nasional dalam kurun waktu 2022–2024, indikator ini belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas dan dinamika proses pemberdayaan masyarakat. Kenaikan jumlah desa mandiri tidak serta-merta merefleksikan terjadinya transformasi sosial di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, pembangunan masih bersifat *top-down*, dan partisipasi masyarakat bersifat prosedural, bukan substantif.

Analisis terhadap tiga dimensi IDM (sosial, ekonomi, ekologi) menunjukkan adanya korelasi potensial dengan konsep pemberdayaan, namun belum semua aspek yang esensial — seperti relasi kuasa, kesetaraan gender, dan kapasitas kelembagaan lokal — dapat ditangkap oleh indikator teknokratis yang digunakan dalam IDM. Ketimpangan

wilayah juga memperkuat kesimpulan bahwa pendekatan satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*) tidak cukup dalam membaca realitas pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian, IDM perlu dipahami bukan hanya sebagai alat ukur administratif, melainkan sebagai alat reflektif yang mampu membaca proses pembangunan secara kontekstual dan partisipatif.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat dimensi kualitatif dalam Indeks Desa Membangun (IDM) dengan menambahkan indikator yang mampu menangkap kualitas partisipasi warga, kapasitas kelembagaan masyarakat, serta tingkat keberdayaan kelompok rentan. Selain itu, integrasi pendekatan evaluatif yang bersifat partisipatif, seperti *participatory rural appraisal*, dapat melengkapi data kuantitatif sehingga menghasilkan gambaran kondisi desa yang lebih utuh dan kontekstual.

Upaya peningkatan kapasitas lokal juga menjadi hal yang krusial, terutama melalui pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok marginal, guna menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan. Di sisi lain, kebijakan terkait IDM hendaknya disesuaikan dengan keragaman kondisi wilayah, agar tidak terjadi penyederhanaan terhadap kompleksitas realitas desa di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran bagi pengembangan IDM yang lebih reflektif dan transformatif, serta mendorong arah pembangunan desa yang tidak hanya mandiri secara administratif, tetapi juga berdaya secara sosial.

REFERENSI

- Hudayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, A., Indiyanto, Z., Fauzanafi, M., Dyah, F. N., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). *Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul* (Vol. 2, Issue 2).
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kemendesa. (2024). *Indeks Desa Membangun*.
- Kerta Arsana, I. G. N., Yekti, M. I., & Astiti, S. P. C. (2024). Peningkatan Implementasi Tri Hita Karana Pada Keberlanjutan Pengelolaan Penyediaan Air Minum Perdesaan di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(1), 66. <https://doi.org/10.22146/jkn.90282>

- Musfiroh, M., Mulyani, S., Budi, E., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETAHANAN KELUARGA DI KAMPUNG KB RW 18 KELURAHAN KADIPIRO KOTA SURAKARTA Analysis of Family Resilience Factors in Kampung KB RW 18, Kadipiro Village, Surakarta City. *PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 2019.
- Nurmalasari, D., & Supriyadi, E. I. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Identitas: Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung*, 1(1), 64–74.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (3rd ed.). Rafika Aditama.
- Sukmawati, F., Haizam, M., & Saudi, M. (2019). Effects of Utilization of Village Funds on Community Empowerment in Indonesia. In *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net (Vol. 6, Issue 5). www.ijicc.net
- Sunoto, S. P., Aziz, W. K., & Desthoni. (2023). Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>
- Ulum, M. C., & Anggaini, N. L. V. (2020). *Community Empowerment: Teori dan Praktik Pemberdayaan Komunitas*. University Brawijaya Press.
- Wahyuningrat, Rosyadi, S., Yamin, M., Darmawan, A., Runtiko, A. G., Wijaya, S. S., Gunarto, G., Nuraini, H., Sulaiman, A. I., & Ahmad, A. A. (2024). Does Rural Development Enable Community Empowerment? Evidence from Village Fund in Indonesia. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1), 6141–6153. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00453>
- White, S. C. (1996). Depoliticising development: The uses and abuses of participation. *Development in Practice*, 6(1), 6–15. <https://doi.org/10.1080/0961452961000157564>
- Wulz, F. (1986). The concept of participation. *Design Studies*, 7(3), 153–162. [https://doi.org/10.1016/0142-694X\(86\)90052-9](https://doi.org/10.1016/0142-694X(86)90052-9)